



Buletin Parlementaria

Nomor 981/III/X/2017 • Oktober 2017



**Trilogi KOKAM
Harus Dikedepankan**

**Legislator Pertanyakan
Kinerja KKIP Dalam
Impor Senjata Polri**

**Sejumlah
Masalah Aktual
Dibahas Komisi III
dengan Kapolri**

**TIDAK
DIPERJUAL
BELIKAN**

Sejumlah Masalah Aktual Dibahas Komisi III dengan Kapolri

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Tito Karnavian beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, ada beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam rapat.

Pertama, jelas Bambang, terkait penembakan tiga personel Brimob di Blora, Jawa Tengah, baru-baru ini. Bambang mengaku, pihaknya meminta agar Kapolri lebih ketat kepada pelaku dan memberikan penindakan tegas kepada atasannya. Terutama, dalam hal pengawasan persenjataan yang dimiliki Anggota Polri.

“Setiap tahun harus dilakukan evaluasi kepemilikan senjata dengan serangkaian test, terutama psikologi dan masalah pribadi Anggota Polri itu sendiri. Itu tugas langsung pimpinan yang bersangkutan,” kata Bambang, saat memberikan pengantar rapat kerja. Pembahasan berikutnya, masih kata politisi F-PG itu, terkait polemik impor senjata oleh Polri, yang diramaikan oleh Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Menurut Bambang, permasalahan ini sudah selesai, karena ini seharusnya merupakan tugas pemerintah.

“Koordinasi pemerintah buruk. Namun belakangan kita sudah mendapat penjelasan dari Menko Polhukam Wiranto, urusan ini sudah diselesaikan dengan baik, antar instansi di bawah Kemenko Polhukam,” urai Bambang.

Berikutnya, terkait Operasi Tangkap

Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi III DPR berharap, tidak boleh ada lagi OTT yang tidak diketahui Kapolda di area Polda masing-masing, di seluruh Indonesia.

“Peristiwa OTT di Batu, ini merupakan suatu hal tidak boleh terjadi lagi. Dimana Kapoldanya tidak tahu ada kegiatan OTT di sana, dan yang diberitahu hanya Kapolres,” imbuh Bambang.

Komisi III juga mengingatkan, agar penggunaan aparat bersenjata untuk mengamankan OTT tidak berlebihan. Karena menurutnya penggunaan aparat dalam kasus OTT di Batu itu sudah seperti menangkap teroris. Bambang menggambarkan, aparat menggunakan senjata dan *uniform* lengkap, sementara yang di OTT adalah pejabat negara yang tidak mungkin punya pasukan bersenjata.

“Jadi kalau ada Kapolda yang tidak tahu di daerahnya ada kegiatan hukum atau OTT, maka Kapolri harus memberikan sanksi yang tegas. Karena Kapolda bertanggung jawab atas wilayah hukumnya, terkait dengan perkiraan ancaman dan gangguan di wilayahnya,” tambah Bambang.

Berikutnya, terkait pemanggilan paksa

Bambang menjelaskan, sesuai dengan UU MD3, DPR RI diberi kewenangan untuk memanggil paksa seseorang setelah tiga kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan yang jelas. UU itu mengamanatkan, pemanggilan paksa dapat dilakukan dengan bantuan Polri.

“Ini perintah UU, dan Polri tidak boleh menolak melaksanakan UU tersebut. Walaupun belum ada hukum acaranya, tapi saya yakin ada ruang untuk menegakkan dan melaksanakan UU itu,” imbuh Bambang.

Dan pembahasan terakhir, kata politisi asal dapil Jawa Tengah itu, terkait pembentukan Densus Tipikor. Fokus pembahasan pada persiapannya, karena Komisi III berharap Densus Tipikor bisa berjalan pada tahun 2018.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto menyoroti persiapan pembentukan Densus Tipikor. Pihaknya menyambut baik Densus Tipikor, dan mendorong Polri menyiapkan perangkat serta aturan untuk memastikan Densus Tipikor itu benar-benar bersih dan bukan malah menjadi tempat praktik Tipikor yang baru.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang mengkritik pengamanan OTT pada kasus yang menimpa Walikota Batu nonaktif, Eddy Rumpoko. Pengamanan yang dilakukan polisi dinilai *overacting*, karena seperti membawa teroris. ■

(sc) Foto: Suci/hr



Suasana Rapat Kerja antara Komisi III DPR dengan Kapolri



DPR Sambut Baik Rencana Kunjungan Presiden Korsel



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Duta Besar Korsel Cho Tae Young

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM, Fadli Zon menyambut baik rencana kunjungan Presiden Korea Selatan. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima Duta Besar Korea Selatan (Korsel), Cho Tae Young di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

“Kedatangan Dubes Korsel ke DPR RI hari ini merupakan kunjungan biasa. Salah satunya membicarakan tentang rencana kunjungan Presiden Korsel ke Indonesia. Dan saya katakan bahwa kami di DPR RI menyambut baik rencana tersebut. Meski belum dipastikan tanggal atau harinya. Karena pastinya hal itu membawa dampak yang sangat positif bagi hubungan Indonesia dan Korsel ke depannya,” ujar Fadli.

Pada kesempatan itu, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini, pihaknya juga membicarakan tentang hubungan bilateral kedua negara yang dari tahun ke tahun semakin baik. Hal itu salah satunya ditandai dengan kerja sama di bidang ekonomi dan pertahanan lewat pembelian berbagai jenis alutsista (alat utama sistem pertahanan).

Terkait dengan adanya kekhawatiran kehalalan plus higienitas sebagian pihak akan masuknya makanan dari Korea, Fadli mengatakan bahwa hal tersebut seutuhnya wewenang dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang melakukan penilaian dan penyelidikan lebih lanjut. Ia berharap BPOM itu dapat menjalankan fungsi yang diamanahkan tersebut dengan maksimal.

Fadli juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kegiatan yang dilakukan Korea Utara beberapa waktu lalu yang bisa memicu konflik di wilayah semenanjung Korea. Hal tersebut tentu sangat membahayakan dan dapat memicu perang yang juga melibatkan beberapa negara di dalamnya. Ia berharap kegiatan tersebut dapat segera dihentikan, dan konflik tersebut dapat segera berakhir. ■

(Ayu/mp). Foto: Arief/hr

- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH**
Achmad Djuned, S.H., M.Hum. (Sekjen DPR RI)
- WAKIL KETUA PENGARAH**
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)
- WK. PIMPINAN REDAKSI**
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),
Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis),
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)
- REDAKTUR**
Mastur Prantono, Suciati, S.Sos
- SEKRETARIS REDAKSI**
Hasri Mentari, Guntur Dewanto
- ANGGOTA REDAKSI**
Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen,
Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra
Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega
- REDAKTUR FOTO**
Eka Hindra, Iwan Armanias
- FOTOGRAFER**
Doeh Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief
Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni, Azka Restu Fadilah
- ADMINISTRASI FOTO**
Bagus Mudjiharjanto
- ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN

- PIMPINAN PENERBITAN**
Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)
- STAF PRODUKSI**
Subadri, S.E, Barliansyah,
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom
- DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Drs. Karyanto (Kasubag Distribusi)
- ADMINISTRASI**
Sjaefudin, S.Sos
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Mujiono
- PHOTOGRAFER ART**
Friederick Munchen
- STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Arif, Lamin, Remon,
Yuliana Puspita, Ifan, Izzi Fauzul Umam
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyerahkan cenderamata kepada Wakil Ketua Parlemen Turki Ahmet Aydin

Pengembangan Energi Panas Bumi Mutlak Diperlukan untuk Ketahanan Energi

Indonesia dan Turki memiliki banyak kekayaan alam dari energi panas bumi. Perkembangan terbaru sektor energi panas bumi di Turki telah mengilhami banyak orang Indonesia.

“Bagi Indonesia, pengembangan energi panas bumi mutlak diperlukan jika kita ingin mencapai tujuan nasional untuk ketahanan energi dan menjadi produsen tenaga panas bumi terbesar di dunia,” kata Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dalam sambutannya saat pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Turki Ahmet Aydin dan Ketua Grup Kerja sama Bilateral Turki - Indonesia Hamza Dag di Gedung Parlemen Turki, Ankara, Selasa (10/10/2017).

Kerja sama kedua negara di sektor ini, lanjutnya, ditandai salah satunya dengan investasi perusahaan Hitay di Indonesia. “Parlemen Indonesia menyambut baik dan mendukung investor asing di bidang energi dan sektor lainnya yang membantu pembangunan nasional dan alih pengetahuan serta teknologi,” ungkap politisi Demokrat ini.

Kerja sama kedua negara saat ini sangat menggembirakan dan harus diperluas. Dalam pertemuan terakhir di Ankara tahun ini, kedua pemimpin

Presiden Joko Widodo dan Presiden Erdogan telah sepakat untuk melanjutkan tren positif perdagangan dan investasi kedua negara, termasuk negosiasi mengenai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Turki (IT-CEPA). Indonesia dan Turki mencatat 13 miliar dalam perdagangan bilateral tahun lalu yang tentunya berpotensi untuk meningkat terus.

Indonesia dan Turki telah membuktikan keberhasilannya dalam kerja sama industri pertahanan dengan kesepakatan pembuatan tank menengah Kaplan. Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang produksi kapal selam dan pesawat tak berawak, yang akan ditindaklanjuti oleh



tim dari kedua negara.

“Sebuah nota kesepahaman antara produsen pesawat terbang Dirgantara Indonesia dan industri kedirgantaraan Turki akan mendorong kerja sama lebih erat di sektor ini,” tegasnya.

Indonesia dan Turki juga telah sepakat untuk memperkuat hubungan dalam memerangi terorisme, dengan pertukaran informasi intelijen dan pengembangan bersama dari sistem intelijen Teknologi Informasi (TI). Kerja sama tersebut di atas adalah sebagian dari kerja sama yang telah berjalan dan memperkuat hubungan kedua negara.

Lebih lanjut legislator dapil Jawa Tengah ini menegaskan, bahwa dunia saat ini dihadapkan pada banyak tantangan mulai dari terorisme, fanatisme, konflik regional, perlambatan ekonomi, krisis pengungsi, dan perubahan iklim.

Ia mengharapkan antara Indonesia dan Turki menjalin persahabatan yang cukup tinggi dan bisa membantu saudara-saudara kita khususnya sesama muslim yang saat ini dalam keadaan tertindas. “Seperti saudara kita yang tertindas di Myanmar. Sebagaimana kita ketahui Muslim Rohingya sangat menderita di sana karena perlakuan pemerintahnya yang dulu juga Indonesia sangat memperjuangkan masalah demokrasi.”

Di akhir sambutannya, ia berharap, Wakil Ketua Parlemen Ahmet Aydin dan anggota Parlemen Turki khususnya untuk berkunjung ke Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, Agus didampingi enam anggota DPR RI yakni Anita Jacoba Gah, Siti Mufattahah, Syofwatillah Mohzaib, Willem Wandik, Muhammad Syafrudin, dan Ida Fauziyah.

Didampingi pula oleh Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno, Kepala Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Asep Sugiharta, Staf Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satry Nugraha dan Yudo Dwinanda, serta staf Kedutaan Besar RI Ankara. ■

(suci, mp) foto: suci/hr

TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 Masih Berlaku

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan, komunisme tidak boleh hadir di Indonesia, karena TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) masih berlaku.

“Saya kira TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 dinyatakan berlaku. Ini mengonfirmasi dan menyatakan secara tegas bahwa komunisme tidak boleh hadir di Indonesia, termasuk kehadiran partai komunis,” tegas Fadli, saat menerima Gerakan Pemuda Al Washliyah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Selain itu, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kriminalisasi ulama. Politisi F-Gerindra itu menegaskan, seharusnya aparat hukum berlaku adil dan proporsional. Apalagi kepada ulama, yang menjadi tokoh panutan bagi umat Islam. Menurutnya, jika aparat penegak hukum melakukan tindakan yang diskriminatif, akan merugikan pemerintah dan penegakan hukum itu sendiri.

“Beberapa waktu yang lalu ada perlakuan yang dianggap diskriminatif kepada ulama dalam masalah hukum. Persoalan-persoalan yang seharusnya menjadi masalah hukum, kemudian dicari-cari dan direkayasa, kemudian dijadikan permasalahan hukum,” tambah Fadli.

Sementara terkait aspirasi pembatasan impor, Fadli mengatakan, DPR senantiasa mengingatkan kepada pemerintah untuk membatasi impor. Apalagi, termasuk sektor pangan. Pasalnya, impor telah menjauhkan Indonesia dari cita-cita kedaulatan pangan.

“Jika kebijakan impor dilaksanakan ketika kita masih memproduksi, ini sangat membahayakan kita. Misalnya petani tebu atau petani beras, maka harganya pasti jatuh karena adanya impor. Apalagi ketika musim panen tiba,” sorot politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebelumnya, Ketua Gerakan Pemuda Al Washliyah Wizdan Fauzan Lubis menyampaikan beberapa poin, seperti tidak boleh dicabutnya TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), maraknya kriminalisasi ulama, pembatasan impor, hingga mengundang Fadli untuk hadir pada Milad Gerakan Pemuda Al Washliyah pada Januari mendatang. ■

(sf/mp) foto: Jayadi/hr



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima Gerakan Pemuda Al Washliyah

Trilogi KOKAM Harus Dikedepankan

Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) sebagai salah satu kegiatan dari Pemuda Muhammadiyah, didorong untuk mengedepankan Trilogi KOKAM. Menjaga ukhuwah islamiyah, NKRI, dan menggembarakan kehidupan kemanusiaan serta kebangsaan harus digerakkan oleh setiap personel KOKAM. Pemuda Muhammadiyah pun diharapkan memberikan karya nyata, bukan tekstual belaka.



Wakil Ketua DPR F. R. Kurniawan diarak pada Apel Siaga Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM) di Banjarnegara.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan kepada seluruh Pemuda Muhammadiyah, termasuk personel KOKAM di dalamnya, untuk dapat mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan berbagai kegiatan yang memberi kemanfaatan kepada masyarakat, dan menjadi garda terdepan menegakkan reformasi yang telah digalang oleh pemuda dan kader Muhammadiyah, serta seluruh rakyat Indonesia.

“KOKAM jangan terjebak dengan masalah seremonial dan situasi tekstual belaka, tapi karya nyata untuk bangsa dan negara ini. Ayo berjuang bersama dengan seluruh kekuatan rakyat, *amar ma’ruf nahi munkar* untuk mengisi kemerdekaan,” ajak Taufik saat memberikan orasi pada Apel Siaga KOKAM Cinta Indonesia, Pemuda Muhammadiyah se-Banjarnegara, di Alun-alun Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Minggu (8/10/2017).

Apel siaga yang diikuti lebih dari 1000 personel KOKAM itu mengambil tema Menumbuh Kembangkan Militansi Kader, Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme untuk Banjarnegara Berkemajuan. Hadir dalam acara itu, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono, serta sejumlah tokoh Muhammadiyah dan masyarakat Banjarnegara.

Taufik tak meragukan kiprah Pemuda dan Keluarga Besar Muhammadiyah. Menurutnya, di setiap pergerakan republik ini, Muhammadiyah selalu ikut serta dalam perjuangan kebangsaan. Bahkan sejak era proklamasi kemerdekaan, pengkhianatan PKI kepada NKRI pada tahun 1965, hingga era reformasi. Bahkan, pada tahun 1998, Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Amien Rais, juga memberikan andil dalam menggerakkan reformasi Indonesia.

“Kita mengenal bagaimana perjuangan 1998 itu. Siapapun bisa menjadi apapun juga. Semua rakyat bisa menjadi Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Presiden RI karena reformasi. Itu adalah hasil

kerja keras Pemuda Muhammadiyah dan tokoh reformasi Amien Rais. Sekarang tinggal kembali pada diri kita, apa kita hanya mau menjadi penonton, ataukah kita mau menjadi garda terdepan dalam meningkatkan reformasi. Apakah saudara bersedia?” tanya Taufik kepada seluruh personel KOKAM.

Legislator F-PAN itu menambahkan, rakyat sudah berjuang untuk menumpas habis komunisme dan memberi pintu gerbang kemerdekaan untuk membangun bangsa dan negara ini. Pemuda Muhammadiyah lahir karena adanya kekuatan rakyat dan perjuangan kebangsaan. Peran-peran Pemuda Muhammadiyah dan KOKAM harus terus mengakar di masyarakat, sehingga peran Muhammadiyah semakin terasa di masyarakat.

“Jangan ajarkan Muhammadiyah dengan komunisme. Jangan ajarkan Muhammadiyah dengan toleransi. Jangan seolah-olah kita harus diberi pelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila kepada Pemuda Muhammadiyah. Karena Pemuda dan Keluarga Besar Muhammadiyah-lah yang paling depan dalam menyusun bangsa dan negara ini,” tegas Taufik.

Mengakhiri orasinya, Taufik mengajak seluruh Pemuda Muhammadiyah dan personel KOKAM untuk memberikan karya nyata kepada bangsa dan negara. Sebagai organisasi Islam yang berwawasan kemajuan, Pemuda Muhammadiyah harus mampu melanjutkan peran sejarahnya, menjadi organisasi pemuda yang besar dan memiliki kemampuan untuk mencetak generasi-generasi muda Indonesia, calon pemimpin masa depan.

“Isilah kekuatan dan pemikiran Anda untuk bermanfaat secara *amar ma’ruf nahi munkar* pada saatnya nanti menjadi pemimpin yang *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathanah* (cerdas). Selalu ingat, kita jangan terjebak oleh seremonial dan tekstual, tapi junjunglah trilogi KOKAM. Saya yakin, semua akan berada di garda paling depan untuk menuntaskan reformasi,” pesan Taufik. ■



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi Ketua BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf menerima Delegasi Polandia Stanislaw Karczewski

Indonesia – Polandia Siap Tingkatkan Kerja Sama

Indonesia dan Polandia siap meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai bidang. Terdapat tiga sektor utama yang akan menjadi prioritas kedua negara, yakni sektor pertanian, pertahanan dan pendidikan.

Demikian mengemuka saat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima langsung delegasi Polandia yang dipimpin oleh Ketua Senat Polandia Stanislaw Karczewski di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (06/10/2017). Delegasi Polandia terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Peraturan dan Etika Senator Polandia, Wakil Ketua Komisi Pertanian serta Dubes Polandia untuk RI.

“Indonesia – Polandia sangat dekat, dari bendera saja hampir sama yaitu merah dan putih. Kami harapkan hubungan bilateral kedua negara bisa terus ditingkatkan demikian juga dengan hubungan antarparlemen,” kata Fadli.

Untuk menindaklanjuti hal itu, lanjut Fadli, dalam waktu dekat Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia – Polandia akan berkunjung ke negara yang

beribukota Warsawa tersebut. Polandia merupakan mitra negara yang penting bagi Indonesia. Mengingat, hubungan baik telah terjalin selama 62 tahun, kedua negara berpeluang meningkatkan kerjasama, mulai dari pertanian, perdagangan alutsista, pendidikan, pariwisata hingga ekonomi kemaritiman.

Di bidang pendidikan, keduanya sepakat membuka peluang untuk meningkatkan pertukaran pelajar. Saat ini, jumlah mahasiswa asal Indonesia yang menimba ilmu ke Polandia masih sedikit. Ke depan, Polandia patut dipertimbangkan sebagai pilihan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, begitupun sebaliknya.

“Ini bidang-bidang yang sangat memungkinkan untuk kerjasama antara kedua negara, dalam waktu dekat juga akan ada kunjungan dari GKSB Indonesia

– Polandia dipimpin Ketua GKSB Imam Suroso,” imbuh politisi Gerindra ini.

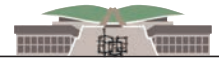
Sementara itu, Ketua Senat Polandia mengatakan Indonesia dan Polandia memiliki banyak kesamaan, selain kemiripan lambang negara, sama seperti Indonesia, Polandia juga mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Karena itu, ia mendorong kedua negara bisa meningkatkan kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan wilayah.

“Semua isu-isu ini sudah dibahas secara detail dengan pihak terkait, tetapi yang terpenting bagaimana kita menciptakan iklim kondusif untuk melakukan pembicaraan selanjutnya,” papar Stanislaw Karczewski.

Ia juga menyampaikan bahwa kunjungannya ke DPR merupakan pertemuan terakhir dari serangkaian kegiatan Delegasi Polandia selama di Indonesia. Sebelumnya delegasi telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Perdagangan, Menko Maritim, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertanian.

“Pembicaraan dilakukan sangat produktif, saya yakin bahwa hasil pembicaraan tersebut akan sangat baik dan bisa dimanfaatkan kedua negara kita,” tutupnya. ■

(ann/sc) Foto: Jayandri



Komisi V DPR Kunjungi Pengungsi Gunung Agung

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, melakukan kunjungan ke Posko Siaga Pengungsi Gunung Agung di GOR Sweca Pura, Bali. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), meningkatnya aktivitas Gunung Agung dalam keadaan kritis mendorong peningkatan jumlah pengungsi, yang mencapai 427 titik pengungsian di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

“Kunjungan ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan peralatan, sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana dan sanitasi,” ungkap Fary Djemy usai meninjau tempat pengungsian di Bali, Selasa (10/10/2017) bersama sejumlah anggota Dewan didampingi Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta beserta pejabat Kementerian PUPR, Kemenhub, Basarnas, dan BMKG.

Masih kata, Fary Djemy ada beberapa hal yang harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemerintah Daerah khususnya tentang penanganan air minum.

Fokus penanganan saat ini kepada evakuasi pengungsi, karena itu Komisi V DPR meminta kesiapan Dinas Perhubungan agar siaga menangani pengungsi melewati jalur darat maupun laut jika nanti terjadi erupsi.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini menjelaskan, penanganan yang berkaitan

dengan infrastruktur akan segera dibicarakan karena ada beberapa jalan, jembatan, embung, waduk yang harus cepat ditangani jika terjadi erupsi. Karena itu harus diminimalisir sedini mungkin sebelum terjadi erupsi.

Pada kesempatan yang sama Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta menjelaskan, tanggap darurat penanganan evakuasi pengungsi secara umum sejauh ini sudah dapat dipenuhi dan sudah dikoordinasikan kepada seluruh komponen Pemerintah.

“Seluruh kendala sudah disampaikan dan penyelamatan manusia menjadi prioritas. Karena itu lokasi pengungsian telah disiapkan H-3. Sampai saat ini telah berjalan normal,” jelas I Nyoman Suwirta.

Lebih dari itu, I Nyoman Suwirta berharap Tim Komisi V DPR RI bisa menjembatani dengan berbagai sektor, jangan sampai pengungsi kelaparan. Adapun batas waktu pengungsi bertahan, akan menunggu keputusan lebih lanjut dari BMKG Bali. ■

(dn.mp), Foto : Doeh/hr



Tim Kunspek Komisi V dipimpin Fary Djemy Francis mengunjungi Posko Siaga Pengungsian Gunung Agung di GOR Sweca Pura, Bali

Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP Dalam Impor Senjata Polri



Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR Al Muzzammil Yusuf

Anggota Panja Undang-Undang Industri Pertahanan DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf mempertanyakan kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dalam impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) milik Korps Brimob Polri yang menimbulkan kekisruhan antara TNI dan Polri.

“Terkait dengan kekisruhan impor senjata Polri, sebagai salah seorang pembuat Undang-Undang Industri Pertahanan, saya mempertanyakan kinerja KKIP yang diketuai langsung oleh Presiden dalam melaksanakan amanah Undang-Undang No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan,” kata Almuzzamil Wakil Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menurut alumni Ilmu Politik UI ini, kisruh impor senjata Polri seharusnya tidak terjadi jika KKIP menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai Pasal 21 UU Industri Pertahanan, yaitu menetapkan dan mensinkronisasi pembelian senjata atau alutsista TNI, Polri, dan lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

“Semangat UU Industri Pertahanan itu

adalah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Jadi TNI dan Polri wajib menggunakan produk senjata dalam negeri. Jika terpaksa harus impor maka undang-undang ini memerintahkan wajib mendapat persetujuan KKIP.” Jelas

Ketua DPP PKS Bidang Polhukam ini.

Sedangkan pimpinan dan anggota KKIP ini menurut Muzzammil terdiri dari Presiden sebagai Ketua, Menteri Pertahanan sebagai Ketua Harian, dan Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua. “Adapun anggota KKIP di dalamnya termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Jadi kekisruhan ini tidak akan terjadi jika KKIP melakukan koordinasi dan melaksanakan perintah UU dalam pengadaan senjata atau alutsista,” ujarnya.

Menurut Muzzammil seharusnya Polri memiliki semangat yang sama dengan undang-undang ini untuk membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri apalagi senjata yang dibutuhkan bukan senjata serbu tapi untuk tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kalaupun harus impor maka undang-undang ini memerintahkan impor alutsista tidak boleh melalui broker tapi harus G to G atau langsung ke pabrikan, wajib mengikutsertakan industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, jaminan tidak adanya potensi embargo, adanya imbal dagang, dan adanya kandungan lokal,” papar politisi PKS asal Lampung ini. ■

(ns) foto: andri/hr

Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Tentang Negosiasi dengan Freeport

Beberapa waktu yang lalu, Pemerintah dengan PT. Freeport telah melakukan negosiasi yang cukup panjang tentang divestasi saham, pembangunan smelter, dan relaksasi ekspor. Dalam negosiasi tersebut dicapai kesepakatan diantara kedua belah pihak untuk empat hal penting, yaitu PT. Freeport Indonesia akan mengubah bentuk kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang memberikannya hak operasi hingga tahun 2041.

Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum, PT. Freeport Indonesia berkomitmen akan membangun smelter baru di Indonesia dalam waktu

lima tahun. Freeport McMoRan akan mendivestasikan kepemilikan sahamnya di PT. Freeport Indonesia, hingga kepemilikan Indonesia di PT. Freeport Indonesia menjadi 51 persen. Demikian hal tersebut dikatakan



Freeport Tetap Sepakati Divestasi Saham 51 Persen

Anggota Komisi VII DPR RI Tony Wardoyo didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar konferensi pers di Media Center DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, terkait masalah divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia.



Anggota Komisi VII DPR RI Tony Wardoyo didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe menggelar Konferensi pers di Media Center DPR terkait divestasi 51 persen saham Freeport Indonesia

“PT. Freeport Indonesia telah menyatakan bahwa pihaknya masih tetap berkomitmen pada kerangka kesepakatan yang sudah diumumkan pada tanggal 29 Agustus 2017 lalu. Kesepakatan yang dicapai tersebut adalah divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia, pembangunan smelter dalam waktu 5 tahun oleh Freeport, dan peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan PT. Freeport Indonesia,” ucap Tony Wardoyo, Senin (9/10/2017).

Tony menyampaikan bahwa PT. Freeport pada prinsipnya akan melaksanakan komitmen tersebut. Selain divestasi saham 51 persen, pembangunan smelter diprioritaskan di Papua, yakni di areal mulut tambang.

“Sedangkan untuk penerimaan negara yang dimaksud adalah terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), royalti, pajak daerah, dan lain-lain, termasuk juga bagi hasil untuk pemerintah pusat dan Pemda Provinsi Papua,” terangnya.

Tony mengatakan, pada intinya PT. Freeport Indonesia telah menyetujui untuk melepas 51 persen sahamnya. “Surat keberatan yang dikirimkan Freeport kepada Kementerian Keuangan hanya terkait masalah skema divestasi, bukan menolak divestasi 51 persen saham,” tandasnya. ■

(dep.mp) Foto : Runit/hr

Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu saat memimpin rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

“Untuk itu Komisi VII DPR meminta kepada Menteri ESDM untuk menjelaskan hasil negosiasi tersebut dengan rinci dan komprehensif,” ucap Gus Irawan, Senin (9/10/2017).

Terhadap permintaan Dewan di Komisi VII tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, mengenai renegotiasi kontrak PT. Freeport Indonesia itu kesepakatan besar sudah dicapai pada tanggal 27 Agustus 2017, yaitu pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum dua kali sepuluh tahun, sesuai dengan Undang-Undang Minerba.

“Diperpanjang pertama dari tahun 2021 sampai 2031, kemudian apabila memenuhi persyaratan maka dapat diperpanjang lagi sampai sepuluh tahun kedua, dengan tiga persyaratan yaitu PT. Freeport harus mendivestasikan sahamnya sebesar

51 persen untuk kepemilikan peserta Indonesia, dalam hal ini gabungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” terang Jonan.

Syarat kedua yang diminta pemerintah adalah untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian sesuai dengan amanah Undang-Undang Minerba dalam waktu lima tahun setelah persetujuan diberikan. Dan syarat yang ketiga adalah Pemerintah akan mengupayakan penerimaan negara dari hasil produksi PT.

Freeport secara keseluruhan akan lebih tinggi. “Dari pertemuan sampai dengan hari ini, sebenarnya tidak ada yang berubah,” tandasnya.

Jonan menyampaikan bahwa surat Freeport yang ramai diberitakan media akhir-akhir ini, sebenarnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, mengingat Presiden menugaskan agar detail divestasi dibicarakan dengan Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. ■

(dep.mp) Foto : Jayadi/hr



Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan memimpin rapat didampingi oleh Herman Khaeron dan Satya Widya Yudha saat rapat dengan Menteri ESDM



Wakil Ketua Komisi VII DPR Herma Khaeron didampingi Anggota Komisi XI Ecky Awal dalam Forum Legislatif

Empat Aspek Penentu Pertumbuhan Ekonomi Negara

Dalam menopang terhadap kesejahteraan rakyat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena salah satu aspek penting di dalam menyejahterakan rakyat adalah pertumbuhan ekonomi. Ada empat aspek yang menjadi penopang terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni *investment*, *Government spending*, *consumption*, dan kinerja ekspor.

Demikian hal itu dikatakan Anggota DPR RI Herman Khaeron usai menjadi pembicara pada acara Dialektika Demokrasi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

“Keempat aspek inilah yang menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden SBY, pertumbuhannya itu rata-rata 6 sampai 7 persen. Pertumbuhan sekarang rata-rata 4,5 sampai dengan 5 persen. Apakah

pertumbuhan yang sebesar ini memadai?” ujar Herman.

Karena pada saat yang sama kita akan dihadapkan kepada usia produktif dan angkatan kerja yang begitu besar, kalau kemudian pertumbuhannya tidak cukup memadai untuk menampung ruang kerja dari pertumbuhan angkatan kerja yang ada, maka hal itu akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, lanjut politisi F-Demokrat tersebut.

“Kalau pengangguran meningkat

berarti ada penurunan pendapatan masyarakat. Survival masyarakat dalam kehidupannya juga akan turun, dan jika turun maka daya belinya juga turun. Apabila daya beli menurun maka berdampak pada penurunan aspek konsumsi domestik. Padahal itu penting, karena hampir 50 persen dari penopang pertumbuhan adalah dari sektor konsumsi,” paparnya.

Menurutnya, ini sebuah lingkaran yang harus digerakkan. Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting. Supaya rakyat bisa *survive*, dan supaya daya beli rakyat mampu untuk menghidupi sandang, pangan dan papannya. Apabila semua dapat sejalan antara pemenuhan kebutuhan dasar rakyat atau masyarakatnya melalui kebutuhan sandang, pangan, papannya yang terpenuhi melalui *government spending* atau stimulus anggaran negara melalui program-program pemerintah, maka hal ini akan mendorong terhadap sektor konsumsi.

Herman menyampaikan bahwa

pada sisi lain infrastruktur juga akan meningkatkan berbagai aspek lainnya. Infrastruktur harus dibangun menjadikan sebuah *connectivity* dari daerah produksi kepada daerah produsen atau dari kemampuan sumber daya yang ada menjadi penopang kinerja ekspor.

“Ini pemikiran yang sederhana. Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada

saat itulah masyarakat tidak akan *survive* dalam kehidupannya. Situasi ini tidak akan dapat dijawab dengan mudah. Terjadinya pergeseran dari pedagang ritel biasa (offline) menjadi *online*, terjadi kenaikan PPN, menurut saya konteksnya bukan di situ. Sebagian rakyat kita itu kelasnya menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah itulah yang harus disentuh oleh program-program pemerintah,” tandas Herman.

Untuk itu pemerintah harus *balance*

(seimbang), yakni dengan mendorong program-program yang meningkatkan kemampuan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, tambahannya. “Sektor pertanian harus dibangun dengan kemampuan dasar pertanian yakni meningkatkan produktivitas hasilnya. Di kelautan dan perikanan sebagai sumber daya yang bisa meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, juga harus diangkat,” pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto: Rumi/hr

Pembangunan Bandara Kulon Progo Harus Didukung Studi Mitigasi Komprehensif



Tim Kunspek Komisi V dipimpin oleh Sigit Sosiantomo meninjau infrastruktur dan transportasi Bandara Kulon Progo

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menegaskan, pentingnya studi mitigasi secara komprehensif dalam pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, untuk mengetahui berbagai potensi bencana alam sehingga dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak bencana tersebut.

“Fokus Kunspek ini dalam rangka meninjau Bandara Kulon Progo atau New Yogyakarta International Airport. *Ground breaking* dilakukan 7 Januari 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Komisi V DPR ingin memastikan proses pembangunan dan infrastruktur pendukung untuk mempermudah mobilitas penumpang

dan logistik nantinya,” terang Sigit di Kulon Progo, Yogyakarta, Senin (9/10/2017).

Politisi PKS ini juga berharap dapat menginventarisir permasalahan-permasalahan yang masih terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan serta Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi selaku mitra Komisi V DPR di Kabupaten Kulon Progo ini.

Sementara itu Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo berharap pembangunan Bandara di Kulon Progo mampu memenuhi standar pelayanan bandara bertaraf internasional, tapi juga bisa memberi *multiplier effect* yang bisa memacu perkembangan ekonomi, aktivitas bisnis dan usaha kecil menengah.

“Geliat kegiatan pariwisata Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan akan memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui UKM,” pungkas Hasto. ■

(ojie.mp) foto:ogji/hr



Komisi I DPR menandatangani RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi

Komisi I DPR Setujui RUU Perjanjian Ekstradisi RI-China

Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition) untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Pembahasan Tingkat II atau Rapat Paripurna.

“Sepuluh fraksi di Komisi I setuju dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi untuk dibawa ke Tingkat Paripurna,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, saat rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Luar Negeri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Politisi F-PDI Perjuangan itu memastikan, hasil pembahasan Tingkat I ini akan disampaikan pada 17 Oktober mendatang. Selain RUU ini, ada dua RUU lain yang juga akan disampaikan oleh Komisi I DPR.

Sebelumnya Hasanuddin memaparkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain

mempunyai dampak positif, juga berdampak negatif.

“Karena adanya peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di negara tempat kejahatan itu dilakukan,” jelas Hasanuddin.

Untuk pencegahan dampak negatif itu, masih kata Hasanuddin, diperlukan hubungan dan kerjasama yang efektif antar kedua negara melalui perjanjian bilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pemerintah RI dan China telah sepakat menandatangani perjanjian ekstradisi pada 1 Juli 2009 lalu di Beijing.

“Dengan adanya persetujuan itu, hubungan dan kerja sama kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan

pemberantasan kejahatan, diharapkan semakin meningkat,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu Menkum HAM Yasonna H. Laoly mengungkapkan, pihaknya menyambut baik telah selesainya pembahasan RUU ini. Kerjasama ini diharapkan dapat menanggulangi berbagai kejahatan antar negara. Ekstradisi menjadi jembatan bagi dua atau lebih negara dalam menghadapi pelaku pidana.

“Indonesia yang terletak di persimpangan, menjadi tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana, seperti penyelundupan, terorisme, perdagangan manusia, termasuk cybercrime. Sehingga perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga dan negara lain merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak,” imbuh Yasonna. ■

(s.f.mp) foto: azka/hr



Penandatanganan MoU BKSAP - Universitas Moestopo

Memorandum of Understanding (MoU) antara Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) ditandatangani. Isi MoU ini adalah kerja sama kelembagaan di bidang penelitian, pertukaran informasi, dan kajian isu-isu internasional.

MoU tersebut ditandatangani oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf, Plt. Sekjen DPR Damayanti, dan Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo Rudy Ahardjanto, Jumat (6/10/2017), di ruang pertemuan BKSAP Lt. 4 Nusantara III, DPR RI. Kerja sama ini diinisiasi oleh BKSAP untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan menggiatkan penelitian, terutama kajian-kajian internasional.

“Kerja sama ini bisa mendekatkan diri sekaligus mengakrabkan antara DPR

dan Kampus Moestopo,” ucap Nurhayati dalam sambutannya. Nurhayati juga menuturkan, saat ini diplomasi parlemen sangat strategis untuk membawa isu-isu penting ke panggung internasional. DPR sudah beberapa kali menjadi tuan rumah perhelatan parlemen dunia yang membahas isu-isu kontemporer dan membawa manfaat bagi bangsa Indonesia.

BKSAP sendiri, sambung Nurhayati, sudah memiliki 51 Grup Kerja Sama Bilateral termasuk dengan Uni Eropa.

Masih ada 16 parlemen yang menunggu persetujuan pembentukan grup kerja samanya. Dengan terbentuknya grup kerja sama ini diharapkan DPR memainkan perannya dalam berdiplomasi dengan dunia internasional. Di sinilah Kampus Moestopo bisa ikut andil melakukan penelitian dan kajian internasional menyangkut peran DPR selama ini dalam berdiplomasi.

Rektor Moestopo, Rudy Ahardjanto dalam sambutannya mengatakan, fungsi parlemen kini semakin luas. Lewat diplomasi parlemen, Indonesia bisa mensejajarkan dirinya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dan Kampus Moestopo siap mendukung kerja BKSAP DPR RI untuk berdiplomasi dengan memberi hasil-hasil penelitian dan informasi seputar isu-isu internasional. ■

(mih,mp) foto:kresno/hr



BKSAP DPR membuat MoU dengan Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Komisi X Dalami Soal Pemecatan Rektor UNJ

Komisi X DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Rektor Non Aktif Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Profesor DR. Djaali, guna mendengarkan keluhan dan aspirasi yang ingin disampaikan terkait permasalahan pemecatan Rektor UNJ oleh Menristek Dikti beberapa waktu lalu.

Seperti diberitakan berbagai media bahwa Prof Dr Djaali menolak untuk meletakkan jabatan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) meski Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir telah memberhentikannya secara resmi. Djaali diberhentikan per tanggal 25 September 2017, digantikan oleh Prof. Dr. Intan Ahmad, Ph.D sebagai Pejabat Pelaksana Harian Rektor UNJ.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir memecat Djaali dari jabatan rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan alasan bahwa Djaali melanggar beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Keputusan Menristek Dikti tersebut diambil setelah mendapatkan laporan dari tim independen Kemenristekdikti yang bertugas mendalami temuan dari tim Evaluasi Kinerja Akademik (tim EKA) yang meyakini Djaali melakukan beberapa pelanggaran akademik. Nasir menegaskan, terjadi plagiarisme yang cukup tinggi di kampus UNJ. Menurut dia, plagiarisme masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Sementara itu Aliansi Dosen UNJ merilis tiga pelanggaran berat yang dilakukan Djaali. Yaitu, melindungi pelaku plagiarisme, melakukan nepotisme dan otoriter. Aliansi Dosen UNJ menuding

ada praktek plagiarisme yang ditemukan tim EKA terhadap 5 pejabat pemerintah daerah.

Dalam kesempatan RDPU dengan Komisi X DPR, Djaali dengan tegas menyatakan bahwa semua tuduhan yang telah disampaikan secara sepihak kepada UNJ dan Rektor UNJ, merupakan bukti konkrit tindakan sewenang-wenang Kemenristek dikti kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Djaali menilai, Kemenristek dikti sebagai pembina perguruan tinggi di Indonesia tidak menjalankan fungsinya sebagai pembina, namun lebih berfungsi sebagai birokrat penguasa, yang mengedepankan ancaman dan sanksi tanpa memperhatikan sama sekali aspek-aspek keadilan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Rektor UNJ sesuai amanat Senat UNJ, telah menempuh jalur hukum baik PTUN maupun pidana. Djaali memohon kepada Komisi X DPR untuk memberikan pengawasan kepada Kemenristek dikti dan memberikan pengawalan kepada proses hukum yang ditempuh UNJ dan Rektor UNJ.

Menanggapi permohonan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuna di Gedung Parlemen, Kamis (05/10) mengatakan bahwa semua bahan masukan sudah dicatat dan dibacanya. Popong menyatakan akan menindaklanjuti permasalahan itu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi X DPR.



Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjuna

“Kami harus tetap berjalan pada kewenangan yang ada pada kami. Kami tidak punya kewenangan untuk memecat Menteri. Kewenangan kami adalah sesuai dengan tugas sebagai wakil rakyat adalah menjadi pendengar yang baik, kemudian yang kami lakukan pasti akan sesuai dengan kewenangan yang ada. Semua yang kami catat pasti akan kami sampaikan kepada pemerintah,” ucapnya. ■

(dep.mp) Foto: Arief/hr



Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin

Ketua Rombongan Roy Salam menuturkan sejumlah poin terkait capaian perhutanan sosial yang masih rendah dan jauh dari target yang direncanakan. “Hingga kini hanya tercapai kurang dari 5 persen dari 12,7



<https://cdn1-a.production.liputan6.static6.com>



Komisi VI Bahas Isu Penjualan Anak Usaha BUMN dengan Menperin

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno meminta penjelasan terkait penjualan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang jumlahnya mencapai 800 anak usaha saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno.



Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno memimpin raker dengan Menperin

“Yang kita bahas hari ini adalah isu penjualan BUMN, dimana saat rapat koordinasi nasional (Rakornas) Kadin 2017, Presiden sempat menyebutkan bahwa sekarang anak cucu hampir 800, dan Presiden memerintahkan agar perusahaan anak cucu itu dimerger,” ujar Teguh di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10).

Menurut Teguh, jika ada perusahaan BUMN yang dijual maka perlu mengikuti aturan yang berlaku. “Kementerian jika perlu dijual sehubungan ditentukan penggabungan, pengalihan, dan peleburan, pembubaran BUMN diatur oleh peraturan pemerintah,” katanya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Airlangga menyatakan bahwa tidak ada penjualan BUMN seperti yang dipertanyakan oleh Ketua Komisi VI. Ia menegaskan, penjualan BUMN hanya akan dilakukan melalui privatisasi. ■

(dep.mp) foto : Kresno/hr

Banggar Terima Aspirasi Koalisi Masyarakat Percepatan Perhutanan

Badan Anggaran DPR RI menerima audiensi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Percepatan Perhutanan Sosial terkait perhutanan sosial yang merupakan program prioritas nasional dan mandat RPJMN 2015-2019 untuk mencapai 12,7 juta hektar akses kelola masyarakat.

juta hektar,” ujar Roy, Jumat (06/10/2017).

Roy juga menuturkan sejumlah persoalan anggaran yang ada di APBN belum menjangkau kebutuhan biaya penyiapan perhutanan sosial di lapangan. Pada tahun 2017 ini, jumlah belanja

untuk output luas hutan yang dikelola masyarakat sebesar Rp 32,67 miliar dengan target kinerja 330.000 hektar. Karena itu, rata-rata anggaran per hektar adalah Rp 99.000,-

“Sementara hitungan anggaran oleh

koalisi masyarakat sipil, kebutuhan alokasi anggaran untuk percepatan perhutanan sosial sebesar Rp 4,15 triliun, sehingga diperlukan terobosan anggaran,” terang Roy.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin menyambut baik usulan ini dan akan coba didalami untuk selanjutnya disampaikan dalam rapat kerja dengan pemerintah. “Ini jadi masukan dan catatan,” sambung Azis.

Ada tiga usulan yang disampaikan masyarakat sipil, yakni pemanfaatan dana reboisasi yang mengendap, memasukan komponen perhutanan sosial dalam UU APBN 2018 tentang Penggunaan Dana Reboisasi dan revisi PP no 3 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. ■

(hs) foto andri/hr



Tim Kunker Badan Legislatif DPR RI bersama Sekretariat Gubernur Papua Silwanus Sumule usai diskusi tentang Perda Pelarangan Narkoba

Belum Ada Perda Tentang Narkotika di Papua

Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto, mengatakan, belum adanya perda tentang narkotika di Papua menyebabkan regulasi pencegahan peredaran narkoba belum berjalan baik.

“Walaupun sudah ada UU Narkotika, tapi saya kira perlu pencegahan yang diatur di dalam perda, sehingga lebih spesifik mengatur, seperti, adanya kawasan bebas narkoba. Peran sekolah, orang tua, dan masyarakat juga dilibatkan,” kata Politisi F-PAN ini saat rapat dengan Polda Papua, BNNP dan jajaran penegak

hukum di Jayapura, Papua, Kamis (5/9). Ia menambahkan, biasanya setiap daerah kesulitan membuat perda karena minimnya SDM.

Untuk itu, perlu dikomunikasikan lebih lanjut kepada Pemerintah dan DPR.

Selain itu, lanjut Politisi Dapil Jatim ini, rehabilitasi pengguna narkoba

jangan sampai dijadikan satu dengan lapas, karena lapas ini justru menjadi salah satu tempat kegiatan penyaluran narkoba.

“Ini menjadi masalah besar bangsa kita, padahal lapas dibawah kendali pemerintah, tapi menjadi tempat aman bagi para pengedar dan pengguna narkoba,” terangnya.



UU Narkotika Sudah Tidak Sesuai Zaman

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Soebagyo (F-Golkar) menyatakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sangat lemah untuk tetap digunakan di era saat ini, mengingat jenis narkoba yang masuk dan beredar di dunia sudah tertinggal cukup jauh pengaturannya.

Hal itu diungkapkan usai memimpin rapat dengar pendapat Baleg DPR RI bersama aparat penegak hukum Provinsi Kepulauan Riau dan organisasi lintas masyarakat di Mapolda Kepulauan Riau, Rabu (04/10/17).

“Jenis narkoba saat ini sudah mencapai ke-600 kalau tidak salah. Sedangkan di Indonesia pengaturannya masih dalam posisi sampai pada urutan no. 14, padahal yang masuk ke dunia jenisnya sudah sampai urutan ke 45 sampai 65 kira-kira seperti itu,” katanya.

Ia menegaskan, revisi terhadap UU Narkotik sudah harus menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar. Urgensi daripada revisi UU ini menjadi skala besar apalagi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa Indonesia darurat narkoba.

Lebih lanjut politisi dapil Jateng ini menjelaskan, bahwa hal-hal yang nantinya akan dimasukkan dalam UU Narkotika yang baru diantaranya adalah diaturnya bentuk penindakan atau sanksi hukuman, penguatan terhadap sapsras, mengingat aspirasi yang didapat, Kepulauan Riau mengalami kekurangan Sapsras, SDM dan Anggaran.

“Termasuk kesulitan-kesulitan yang tadi dihadapi oleh BNN, Kepolisian dan juga aparat penegak hukum lainnya. Ini yang akan kita kaji ulang. Yang jelas bahwa minimnya SDM di BNN tadi akan sangat sulit untuk melakukan penegakan hukum yang maksimal dan optimal. Polda saja tadi menyampaikan, apalagi BNN SDMnya jauh lebih dari yang diharapkan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Baleg Arsul Sani (F-PPP) mengaku tertarik dengan masukan Kapolda Kepri Sam Budi Gusdian terkait UU No. 35 Tahun 2009 pasal 115 yang berbunyi; “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun”

Masukan yang diberikan Kapolda Kepri Sam Budi Gusdian adalah menambahkan kata “dengan sengaja” di awala kalimat pasal 115 tersebut. Arsul menilai, masukan itu sangat bagus, karena selain usulan ini didapat dari seorang penegak hukum yang concern di bidangnya, usulan ini juga dapat memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang tertangkap tangan sebagai kurir namun dirinya tidak mengetahui, seperti kasus Marry Jane beberapa waktu lalu.

“Saya menangkap usulan-usulan seperti itu bagus, karena ini untuk menghindarkan orang-orang yang katakanlah dia kemudian tertangkap sebagai kurir tapi sesungguhnya dia tidak mengetahui bahwa yang dibawa itu adalah barang yang terlarang dalam hal ini Narkotika,” ujarnya.

“Hal seperti ini, nanti dalam proses peradilan kalau ada unsur seperti itu harus dibuktikan dalam proses hukum baik oleh penegak hukum di tingkat penyidikan POLRI atau BNN atau juga penegak hukum di tingkat penuntutan Jaksa dan juga pada akhirnya penegak hukum di tingkat pemutus pengadilan yaitu hakimnya, ini kan bagus,” puji politisi PPP. ■



Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Firman Soebagyo dan Kapolda Kepulauan Riau Sam Budigudian.

Sementara itu, Sekretariat Gubernur Papua, Silwanus Sumule, mengaku, untuk perda yang mengatur pelarangan narkoba di Papua memang belum ada. Tetapi, baru ada perda mengenai pelarangan miras.

“Karena menurut kami, miras menjadi pintu masuk narkoba. Ini yang gencar dilakukan oleh bapak gubernur menyangkut pelarangan dan peredaran minuman beralkohol,” tutupnya. ■

(ik.mp) foto: jaksa/hr

(ndy) foto: media/ra

Komisi XI Setujui Anggaran Kemenkeu 2018

Komisi XI akhirnya menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan sebesar 45,6 triliun dalam RAPBN 2018. Anggaran 45,6 triliun tersebut terdiri dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp 19,8 triliun, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 118,3 triliun, Ditjen Anggaran sebesar Rp 154,5 miliar, Ditjen Pajak Rp 7,4 triliun, Ditjen Bea dan Cukai Rp 3,3 triliun, Ditjen Perimbangan Keuangan Rp 144,02 miliar, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebesar Rp 119,5 miliar.

Sementara itu, Ditjen Perbendaharaan mendapatkan anggaran sebesar Rp 12,5 triliun, Ditjen Kekayaan Negara Rp 872,9 miliar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebesar Rp 731,7 miliar, dan Badan Kebijakan Fiskal sebesar Rp 157,4 miliar.

Selain itu, Komisi XI juga menyetujui rencana pembiayaan investasi dalam RAPBN 2018 sebesar Rp 62,05 triliun, yang terdiri dari Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

sebesar Rp 2,5 triliun, Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H) sebesar Rp 500 miliar, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Rp 15 triliun, BLU Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp 35,4 triliun.

Wakil Ketua Komisi XI Muhammad Prakosa pun meminta Menteri Keuangan memastikan pembiayaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Dengan catatan bahwa Komisi XI



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Prakosa

meminta kepada Menteri Keuangan untuk memastikan pelaksanaan pembiayaan investasi sesuai dengan aturan dan peruntukannya," jelasnya Rabu (04/10).

Komisi XI juga meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih efisien dalam penggunaan APBN Kemenkeu, terutama terkait anggaran penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-World Bank 2018. ■

(hs,mp) Foto: Andri/hr

Pemerintah Diminta Bangun Pusat Rehabilitasi Korban TPPO

Anggota Timwas TKI DPR RI Rahayu Saraswati meminta kepada Pemerintah untuk menyediakan pusat rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipulangkan dalam keadaan membutuhkan rehabilitasi dan kasih sayang dari orang-orang sekitar.



Anggota Timwas TKI DPR RI Rahayu Saraswati

"Saya minta tolong kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memikirkan step forward tentang nasib para korban TPPO yang jumlahnya tidak sedikit, untuk dapat menyediakan suatu pusat rehabilitasi atau trauma center bagi para korban," tegasnya saat rapat Timwas TKI DPR RI dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta mitra terkait di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (4/10).

Ia menilai, pusat rehabilitasi yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung para korban mengingat hanya tersedia satu pusat rehabilitasi. "Di Indonesia sendiri pusat rehabilitasi yang ada hanya terdapat di Bambu Apus, Jakarta Timur sedangkan di Tanjung Pinang bukan diperuntukkan sebagai pusat rehabilitasi tetapi lebih ke

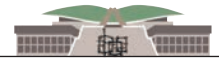
tempat masuknya TKI yang dideportasi kemudian setelah seminggu dipulangkan ke tempat asal," ungkap politisi F-Gerindra itu.

Lebih lanjut ia menghimbau kepada Pemerintah untuk mengalokasikan tanah sebagai tempat untuk mendirikan pusat rehabilitasi tersebut. "Kami siap untuk menyiapkan anggaran dari pusat agar Kemensos dapat mendirikan pusat rehabilitasi tersebut," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan pembangunan TKI Center untuk melayani trauma healing atau penyembuhan trauma. "Ke depan kita punya TKI Centre yang akan dibangun di Leuwipanjang. Terobosan baru insya Allah di situ bisa dipakai untuk rehabilitasi," ujar pria yang akrab disapa Aher tersebut.

Ia mengatakan, sebelum ada TKI Center, penyembuhan trauma yang dialami mantan TKI yang menjadi korban kekerasan, terdapat di rumah sakit jiwa dan Dinsos. Pembangunan TKI Center akan dimulai tahun 2018. Nantinya TKI Center juga akan dilengkapi beragam fasilitas untuk menunjang pendidikan dan pelatihan TKI seperti, caregiver, cooker, housekeepers, ruang simulasi dapur negara lain, dan lain-lain. ■

(tra,mp) foto: itara/hr



Revisi UU KUP, Komisi XI Himpun Masukan Pengusaha

Komisi XI DPR RI menghimpun aspirasi dari Apindo, Kadin, dan Hipmi soal Revisi UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Masukan-masukan yang disampaikan akan dijadikan acuan dalam revisi UU tersebut yang akan dibahas dalam waktu dekat.

Wakil Ketua Umum kamar dagang dan industri (Kadin) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Raden Pardede mengatakan Rabu (4/10) di DPR, prioritas dari revisi UU perlu lebih kepada peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di Ditjen Pajak.

“Adapun perlu perbaikan sistem IT dan analisa data. IT ini sangat penting sekali bahwa yang Indonesia miliki sudah ketinggalan. Bagaimana fiskus kelola pun sangat tertinggal, data bisa tercecer di mana-mana,” kata Raden

Sementara dalam kesempatan yang sama, Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani memaparkan bahwa pasal per pasal dari RUU KUP ini masih banyak yang



Anggota Komisi XI DPR RI Kardaya.

memberatkan dunia usaha. Salah satunya adalah soal sanksi pidana kepada wajib pajak.

“Pidana adalah hal sensitif. Waktu amnesti pajak kemarin, kami bantu Kemenkeu untuk sosialisasi. Kami capture di lapangan, pemahaman pajak masih kurang, pajak pusat dan daerah saja banyak yang tak bisa bedakan. Sanksi pidana harus diberikan ruang,” kata dia.

Terhadap semua aspirasi, Anggota Komisi XI Kardaya pun menilai penting seluruh poin yang disampaikan. Karena pajak dalam pengelolaannya harus dilakukan melalui prinsip kehati-hatian karena pajak harus dicarikan equilibriumnya.

“Pajak harus dicari equilibrium sehingga dapat hasilnya. Pajak itu kalau diturunkan persentasenya, kalau pajak nol maka negara dapetnya nol. Maka kalau pajaknya naik 100 persen, maka negara dapet nol. Ini yang kita cari sehingga yang mewakili pengusaha penting untuk beri masukan supaya nyaman,” terang Kardaya.

Komisi XI kini tengah menghimpun seluruh masyarakat terhadap revisi UU KUP agar nantinya memiliki hasil yang sesuai dengan yang diharapkan banyak pihak dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi. ■

(hs,mp) Foto : Andri/hr

Pemerintah Diminta Kurangi Impor Gula Mentah

Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan pemerintah harus berani mengurangi, jika perlu menghentikan kebijakan impor gula mentah atau raw sugar karena dinilai memberatkan petani.



Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi memberi sambutan saat audiensi dengan perwakilan Gapoktan Gresik

“Kami di Komisi VI sedang berjuang bagaimana impor gula dikurangi, jika perlu kita stop,” kata Khilmi saat beraudiensi dengan 450 perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Gresik - Lamongan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (09/10).

Khilmi mengatakan, adanya impor gula mentah dapat mengancam hasil produksi petani tebu dalam negeri. Sisi lain, keberadaan gula rafinasi yang marak beredar di pasaran menyingkirkan gula kristal putih lokal karena harganya yang lebih murah.

“Harusnya Kementerian Perdagangan bisa menghitung kebutuhan riil

masyarakat. Gula kita sendiri saja gak bisa diserap masyarakat, tetapi gula rafinasi membanjiri pasar. Jadi, sekarang gula petani ini ada di gudang semua,” tuturnya.

Menurut Khilmi, jika pemerintah ingin swasembada gula tercapai, maka harus segera merevitalisasi penuh pabrik-pabrik gula milik BUMN agar semua hasil produksi gula terpakai dan bisa membuka industri turunan baru.

Selain itu, ia menambahkan, produksi dalam negeri bisa saja mencukupi kebutuhan gula nasional sebesar 5,6 juta ton/tahun. Mengingat, kapasitas pabrik raw sugar mampu menghasilkan 7 juta ton/tahun. Sedangkan, kebutuhan raw sugar untuk industri makanan dan minuman (mamin) hanya 2,7 juta ton/tahun.

“Kita akan mendorong untuk swasembada gula, tetapi negeri kita sendiri seharusnya berani memberhentikan impor kalau ingin lindungi petani,” tutup politisi Gerindra ini. ■

(ann,mp) Foto : Jaka/hr

Pembentukan Perda Harus Perhatikan Aspek Kebutuhan Masyarakat

Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di Tingkat I maupun Tingkat II, diharapkan dapat memperhatikan aspek kebutuhan hukum masyarakat. Kuantitas Perda, bukan hanya semata menjadi tujuan utama, namun kualitas Perda juga harus dikedepankan. Sehingga, Perda itu dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

“Satu hal yang penting, bagaimana agar Perda yang dibentuk itu tidak semata-mata dilihat dari kuantitasnya saja, tapi kualitasnya juga. Jangan sampai dibentuk banyak Perda, tapi tidak dapat dilaksanakan,” kata Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk, saat menerima kunjungan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Cianjur, di Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Johnson menekankan, agar Perda itu semakin memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, maka peran partisipasi masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan. Sehingga, melalui partisipasi dan aspirasi

yang disampaikan masyarakat, tercipta relasi yang kuat dalam pembentukan Perda, antara keinginan dan kebutuhan hukum masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh DPRD.

“Itu yang harus diperhatikan. Lebih bagus membentuk dua Perda dan bisa dilaksanakan. daripada lebih dari 10 Perda tapi tidak dapat dilaksanakan. Partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, yang tidak boleh ditinggalkan,” imbuh Johnson.

Johnson juga melihat, untuk mewujudkan Perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu, dibutuhkan sistem pendukung yang

kuat. Sistem pendukung parlemen itu untuk mendukung fungsi Dewan, seperti pelaksanaan fungsi legislasi dengan adanya perancang, fungsi anggaran dengan adanya analisis APBN, dan fungsi pengawasan itu membentuk pusat-pusat riset. Untuk DPRD, sebenarnya hal itu merupakan kebutuhan organisasi dan Anggota Dewan.

“Anggota Parlemen itu lebih banyak pengetahuan umum, karena anggota parlemen harus tahu segalanya, meskipun sedikit. Supaya dia nanti bisa memperjuangkan aspirasi atau kebutuhan yang berkaitan dengan fungsinya. Jadi berbeda dengan pemerintah, yang harus betul-betul memahami apa yang menjadi tugas itu secara detail. Atas dasar itulah, di parlemen itu dibentuk sistem pendukung yang kuat,” jelas Johnson.

Sementara itu, Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Cianjur Heri Wiryawan mengatakan, sebelum pembentukan Perda di DPRD Kabupaten Cianjur, pihaknya selalu mempertimbangkan dan menskronisaikan dengan peraturan di

atasnya, seperti Undang-undang atau peraturan Pemerintah.

“Kami berdiskusi dengan BKD terkait aspek filosofisnya, sosiologis, yuridis, bahkan juga mensinkronkan usulan eksekutif dan legislatif. Sehingga ketika nantinya kami membahas Perda, bisa berjalan lancar, dan sesuai dengan harapan masyarakat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” jelas Heri. ■

(sf,mp) foto: aneik/ky



Kepala BK DPR RI Johnson Rajagukguk bersama DPRD Cianjur.



Tim Pengawas (Timwas) DPR RI bersama Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya. Foto: Ria/Jy

Kini Pemda Berperan Awasi dan Beri Pelatihan TKI

Anggota Tim Pengawas TKI Saleh P Daulay mengatakan, Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39/2004 tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini dibahas DPR akan menambah peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melindungi TKI.

“Peran serta masyarakat luas untuk menyadari pentingnya mendaftarkan kepergian ke luar negeri menjadi perhatian kita, makanya di Revisi UU ini kami minta aparat desa berpartisipasi dan pemerintah daerah mengawasi terutama soal dokumen,” jelas Wakil Ketua Komisi IX Saleh di Balai Peritiga, Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Rabu (4/10/2017).

Lebih lanjut Saleh mengatakan, UU itu juga mewajibkan Pemda untuk mendirikan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dimulai dari level kabupaten/kota, dengan sejumlah dinas yang berhubungan dengan pengiriman TKI berada dalam LTSA.

“Jadi perekrutan melalui satu pintu, tetapi ada peran pemerintah daerah yang mengawasi, jangan ada lagi TKI

yang berangkat ke luar negeri tetapi kepala desanya tidak tahu,” ungkapnya seraya menjelaskan Pemda juga diminta melakukan pelatihan kepada jalan TKI, pasalnya masih banyak TKI yang dikirim hanya lulusan SD dan SMP.

Selain itu, politisi F-PAN itu juga menjelaskan beberapa peraturan baru dalam Revisi UU. Pertama, mengenai asuransi untuk calon TKI yang hanya boleh dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Ketenagakerjaan.

Kedua, pembagian kewenangan antar lembaga agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI. Terakhir, yang diatur UU dalam konteks penguatan perlindungan yaitu adanya atase-atase ketenagakerjaan

yang ditempatkan di negara yang TKI paling banyak.

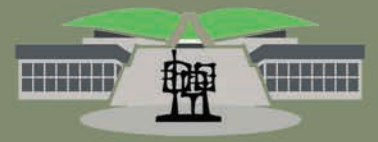
“Atase ini merupakan diplomat yang dipekerjakan di luar negeri, tetapi bekerjanya khusus mengurus TKI terutama di negara yang banyak di minati masyarakat kita,” jelasnya seraya mengatakan untuk penguatan perlindungan TKI, Revisi UU ini juga telah mengatur mengenai sanksi pidana serta denda.

“Kami perbanyak penguatan di bidang hukum. Kami berharap UU ini bisa memaksimalkan upaya kita untuk melindungi tenaga kita di luar negeri,” tambahnya

Usai pertemuan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya mengatakan sangat mendukung Revisi UU tentang TKI dalam konteks penguatan perlindungan. Misalnya mengenai peran utama Kepala Desa (Kades) dalam mengawasi warganya. Bahwa jangan sampai warganya sudah menjadi TKI di luar negeri, tapi tidak diketahui kepala desa.

“Ini juga sinergi dengan kita mengupayakan adanya Kades-Kades dengan pengucuran anggaran desa yang besar. Kan kita sedang menggebu-gebu mempersiapkan sumber daya manusia di desa. Saya kira nanti mereka bisa melaksakannya,” tambah Saleh. ■

(ria.mp) foto:ria/jy



Komisi VII DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri ESDM mengenai RAPBN 2018, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha, Rabu (11/10). Foto: Jayadi/Jy



Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo didampingi Bupati Kulon Progo dan Direktur Utama Angkasa Pura I (AP I) Yogyakarta, saat meninjau lahan Bandara Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (DIY), Senin (9/10), Foto: Naefuroji/Jy



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf M Effendi menerima serikat buruh yang tergabung dalam Indonesia Council (IndustriALL) yang terdiri dari 11 federasi serikat buruh, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/10). Foto: Runi/Jy